



Kesesuaian Konsep *Livability* pada Permukiman disekitar Tempat Pembuangan Akhir

Muhammad Ihsya Anugrah Pratama*, Murtanti Jani Rahayu, Lintang Suminar
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

*Corresponding author email: ihsyanugrah@student.uns.ac.id

ABSTRACT

Livability is the comfort of residing in an environment (Lynch, 1998) and reflects the quality of life in settlements. Areas around the Putri Cempo Landfill, though violating PUPR Ministerial Regulation No.3/2013 and facing environmental and health issues, remain a livelihood source for low-income migrants. This study analyzes the suitability of the Livability concept based on seven components (economy, health, environment, infrastructure, safety, community participation, and building conditions) using a quantitative descriptive method through field observations, questionnaires (100 respondents), and weighting analysis. Results show a Livability score of 74.42 (moderately suitable), with optimal achievements in safety (97.5), building conditions (96.5), and health (95), but low scores in environmental quality (20.75) due to air pollution and limited community participation (36.5). Most residents rely on the informal sector (62%) with incomes \geq IDR 2.5 million/month (72%), while basic infrastructure is adequate except for GOS (12%). Although 95% of respondents reported no severe health issues, environmental risks persist. The conclusion emphasizes the need for integrated interventions to improve air quality, expand public spaces, and strengthen community participation to achieve sustainable settlements aligned with Livability principles.

Keywords: *Livability, settlement, Putri Cempo Landfill*

ABSTRAK

*Livability adalah kenyamanan dalam bermukim di suatu lingkungan (Lynch, 1998). Dalam konteks permukiman, konsep *Livability* mencerminkan tingkat kualitas hidup di suatu wilayah hunian. Permukiman di sekitar TPA Putri Cempo berkembang di kawasan yang bertentangan dengan Permen PUPR No.3/2013 dan menghadapi tantangan lingkungan kesehatan, namun menjadi sumber penghidupan bagi MBR. Penelitian ini menganalisis kesesuaian konsep *Livability* berdasarkan tujuh komponen (ekonomi, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, keamanan, partisipasi masyarakat, dan kondisi bangunan) melalui metode deskriptif kuantitatif dengan observasi lapangan, kuesioner, dan analisis pembobotan. Hasil menunjukkan skor *Livability* 74,42 (kategori cukup sesuai), dengan capaian optimal pada aspek keamanan (97,5), kondisi bangunan (96,5), dan kesehatan (95), namun rendah pada kualitas lingkungan (20,75) akibat polusi udara dan partisipasi masyarakat (36,5). Sebagian besar masyarakat bergantung pada sektor informal (62%) dengan pendapatan \geq Rp2,5 juta/bulan (72%), sementara infrastruktur dasar memadai kecuali RTH (12%). Meski 95% responden tidak mengalami gangguan kesehatan berat, risiko lingkungan tetap mengancam. Kesimpulan penelitian menekankan perlunya intervensi terpadu untuk meningkatkan kualitas udara, memperluas ruang publik, dan memperkuat partisipasi warga guna mencapai permukiman berkelanjutan sesuai prinsip *Livability*.*

Kata kunci: *Livability, permukiman, TPA Putri Cempo*



Pendahuluan

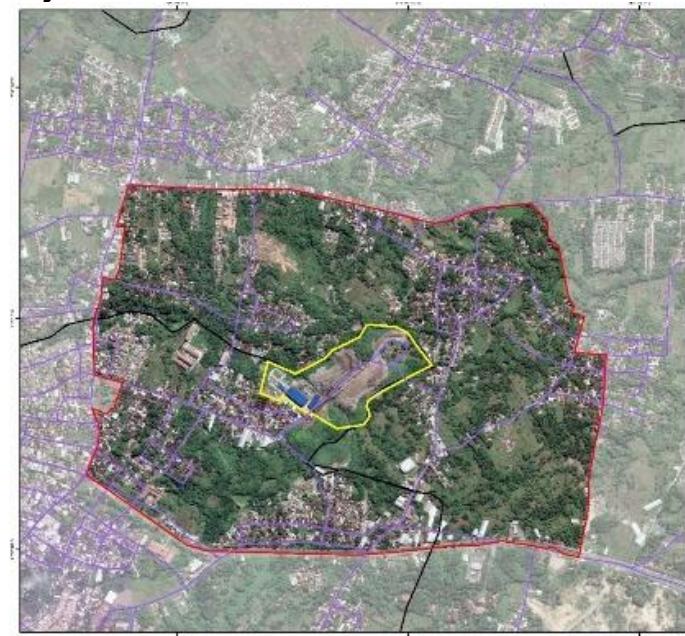
Permasalahan permukiman merupakan isu krusial dalam perkotaan, seiring pertumbuhan penduduk yang meningkatkan permintaan lahan hunian, sementara ketersediaannya terbatas (Prihatin, 2016). Kenaikan harga tanah mendorong masyarakat berpenghasilan rendah menempati kawasan tidak layak huni (Mubarak *et al.*, 2025), yang berdampak pada penurunan kualitas hidup, khususnya terkait akses air bersih, sanitasi, dan infrastruktur (Octavionesti & Mardiansjah, 2017). Dalam konteks kota modern, tantangan utama adalah penyediaan hunian layak (Bah *et al.*, 2018; Safira *et al.*, 2024), sementara tingginya harga lahan dan kepadatan pusat kota mendorong masyarakat tinggal di wilayah berisiko seperti sekitar TPA (Weber *et al.*, 2019). Di Surakarta, RTRW 2011–2031 menetapkan 2.275 ha untuk permukiman, namun belum mencukupi akibat tingginya migrasi—rata-rata 7.539 orang per tahun (2015–2018), yang sebagian besar bekerja di sektor informal karena keterbatasan keterampilan. Salah satu kawasan tidak layak adalah sekitar TPA Putri Cempo yang melanggar Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2011. TPA ini, beroperasi sejak 1985, menampung 300 ton sampah per hari dan kelebihan kapasitas sejak 2005, dengan tumpukan sampah setinggi 28 m di lahan 17 ha, memicu pencemaran air dan risiko kesehatan akibat sanitasi buruk. Kawasan ini dihuni migran tidak terampil berpenghasilan rendah yang mengandalkan sektor informal seperti pemulung, membentuk permukiman spontan yang memberi manfaat ekonomi namun berdampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan (Khadijah, 2019).

Livability merupakan kenyamanan untuk tinggal pada suatu lingkungan (Lynch, 1984), yang secara umum mencakup gabungan faktor sosio-fisik dan sosio-kultural dalam meningkatkan standar hidup suatu ruang (Jomehpour, 2015). Berdasarkan MLCI (*most liveable city index*) 2017, kota-kota diklasifikasikan ke dalam tiga kategori—*top, average, dan bottom tier*—di mana Surakarta, Balikpapan, dan Denpasar konsisten masuk *top tier* sejak 2009. Menurut IAP (2018), terdapat tujuh unsur utama yang membentuk *Livability* permukiman, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, ketersediaan fasilitas umum dan sosial, ruang publik, fungsi ekonomi, sosial, dan budaya, kualitas lingkungan, aspek keamanan, serta keterlibatan masyarakat. Dalam konteks tersebut, penting dilakukan penelitian mengenai kesesuaian konsep *Livability* di permukiman sekitar TPA, khususnya di TPA Putri Cempo, yang menurut Jonatan & Zain (2019) dan Dwinanda *et al.* (2025) seharusnya berjarak minimal 1km dari permukiman, namun kenyataannya banyak permukiman formal dan informal berdiri di dalam radius tersebut (Ramadhanti *et al.*, 2021).



Metode Penelitian

Gambar 1. Peta Wilayah Penelitian



Sumber: Penulis, 2025

Penelitian ini berlokasi disekitar TPA Putri Cempo di Desa Jatirejo, Kecamatan Jebres, dengan batasan wilayah mencakup sebagian Kota Surakarta dan Kab. Karanganyar seluas 233ha berdasarkan delineasi fisik mengacu pada penelitian Jonatan & Zain (2019) serta Dwinanda *et al.* (2025). Pendekatan kuantitatif digunakan dengan metode survei lapangan menggunakan kuesioner tertutup dan lembar observasi. Kuesioner disebarluaskan kepada 100 responden rumah tangga yang dipilih dengan *simple random sampling* dengan rumus Slovin dan tingkat kesalahan 10% (Siyoto & Sodik, 2015), sementara borang observasi digunakan untuk mencatat langsung kondisi lingkungan fisik dan sosial. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik skoring menggunakan skala Guttman (Iskani, 2015), di mana setiap indikator diberi skor biner (0 atau 1) dan dikalikan dengan bobotnya untuk menghasilkan skor variabel, yang kemudian diklasifikasikan menggunakan rumus Sturges guna menentukan tingkat kesesuaian konsep *Livability* pada permukiman sekitar TPA.

Pembahasan

Gambaran Umum

Penelitian ini dilakukan di sekitar TPA Putri Cempo di Mojosongo, yang merupakan fasilitas pembuangan sampah seluas 17 hektar dengan volume harian sekitar 300 ton dari Kota Surakarta dan sekitarnya. Area penelitian mencakup wilayah dalam radius satu kilometer



dari TPA, meliputi RW 28, 30, 38, dan 39 di Kelurahan Mojosongo serta RW 2, 4, 5, 8, dan 10 di Desa Plesungan, Kabupaten Karanganyar, dengan total luas 233 hektar. Berdasarkan observasi, kawasan ini didominasi oleh lahan kosong dan permukiman (swadaya dan formal), serta beberapa unit industri, yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap lingkungan, kualitas hidup, dan risiko dari aktivitas TPA. Selain menimbulkan isu lingkungan seperti bau, polusi udara, dan potensi pencemaran air, keberadaan TPA juga berdampak sosial melalui aktivitas pemulung yang menggantungkan hidup pada daur ulang barang bekas.

Mengidentifikasi komponen *Livability* pada permukiman disekitar TPA Putri Cempo

Kondisi Perekonomian Masyarakat

Variabel kondisi perekonomian masyarakat dalam penelitian ini mencakup dua sub-variabel, yaitu jumlah pendapatan masyarakat dan jenis mata pencaharian. Firdaus (2015) menyatakan bahwa penyediaan sumber penghidupan bagi masyarakat lokal merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan permukiman yang layak huni.

Tabel 1. Hasil Pembobotan Variabel Kondisi Perekonomian Masyarakat

Sub Variabel	Indikator	Skor Indikator	Bobot	Total Skor Sub Variabel
Jenis Pekerjaan Masyarakat	Jenis pekerjaan masyarakat	38	0,5	19
Jumlah Pendapatan Masyarakat	Jumlah pendapatan masyarakat per bulan	72	0,5	36

Sumber: Peneliti, 2024

Perekonomian masyarakat di sekitar TPA Putri Cempo Surakarta didominasi sektor informal, dengan mayoritas pendapatan rumah tangga berasal dari lebih dari satu sumber. Sebanyak 72% berpenghasilan di atas Rp2.500.000 per bulan, sementara 28% di bawahnya. Sebagian besar (62%) bekerja di sektor informal seperti pemulung dan pedagang kecil. Data ini sejalan dengan BPS Kota Surakarta (2023) yang mencatat 59% penduduk bekerja di sektor informal, meskipun persentasenya lebih tinggi di sekitar TPA. Hal ini mencerminkan keterbatasan kompetensi dan akses terhadap pekerjaan formal. Temuan ini juga paralel dengan penelitian Huzaemah (2020) di TPA Piyungan, Bantul, yang menunjukkan dominasi pekerjaan informal, meskipun terdapat perbedaan nominal pendapatan akibat variasi jenis dan volume sampah.

Kondisi Kesehatan Masyarakat

Berdasarkan konsep *Livability*, tingkat kesehatan yang baik tercermin dari kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan secara mudah dan terjangkau Sukanto et



al. (2021). Menurut Sinanto *et al.* (2022), masyarakat yang tinggal di sekitar TPA cenderung lebih rentan terhadap gangguan kesehatan akibat kondisi lingkungan tempat tinggal yang kurang higienis.

Tabel 2. Hasil Pembobotan Variabel Kondisi Kesehatan Masyarakat

Sub Variabel	Indikator	Skor Indikator	Bobot	Total Skor Sub Variabel
Tingkat kesehatan masyarakat	Tingkat Gangguan Kesehatan yang Pernah Dialami	95	1	95

Sumber: Peneliti, 2024

Sebanyak 95% masyarakat sekitar TPA Putri Cempo tidak mengalami gangguan kesehatan berat, namun 5% pernah menderita penyakit serius seperti typhus dan tetanus, terutama yang bekerja langsung dengan sampah. Gangguan ringan seperti diare juga terjadi akibat kondisi lingkungan sekitar TPA. Temuan ini sesuai dengan konsep *Livability*, yang menilai kesehatan masyarakat dari akses terhadap layanan kesehatan dan kualitas lingkungan tempat tinggal (Sukanto *et al.*, 2021). Hasil serupa ditemukan dalam penelitian Sinanto *et al.* (2022) dan Slamet & Nasution (2020), yang menunjukkan bahwa masyarakat sekitar TPA lebih rentan terhadap gangguan kesehatan, khususnya mereka yang terlibat langsung dalam aktivitas pengelolaan sampah. Secara keseluruhan, meskipun sebagian besar masyarakat tidak mengalami gangguan berat, risiko kesehatan akibat kondisi lingkungan tetap menjadi perhatian utama.

Kualitas Lingkungan

Variabel kondisi kualitas lingkungan dalam penelitian ini mencakup dua sub-variabel, yaitu kualitas udara dan kualitas air bersih. Sementara itu, menurut Ni'mah & Kurniawan (2016), kualitas udara di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dapat diidentifikasi melalui keberadaan bau tidak sedap yang dihasilkan dari proses penimbunan sampah yang dilakukan setiap hari.

Tabel 3. Hasil Pembobotan Variabel Kualitas Lingkungan

Sub Variabel	Indikator	Skor Indikator	Bobot	Total Skor Sub Variabel
Kualitas Udara	Frekuensi timbulnya bau tidak sedap yang berasal dari penimbunan sampah	0	0,5	0
Kualitas Air Bersih	Kualitas air bersih yang baik untuk kegiatan sehari-hari	82	0,5	41

Sumber: Peneliti, 2024



Lingkungan sekitar TPA Putri Cempo menghadapi permasalahan utama pada kualitas udara dan sebagian akses air bersih. Bau sampah yang menyengat setiap hari mencerminkan pencemaran udara, sementara 82% warga telah memiliki akses air bersih layak, mayoritas dari sumur dalam (Pamsimas), sedangkan air PDAM masih bermasalah dalam warna dan bau. Masalah udara tercemar tetap menjadi isu serius, sejalan dengan temuan Rahayona *et al.* (2024) yang menyebutkan bau sampah menurunkan kenyamanan lingkungan, dan kondisi ini masih lebih baik dibanding TPA Sukawinatan, Palembang yang kualitas air sumurnya di bawah standar (Septi *et al.*, 2021). Secara keseluruhan, diperlukan perhatian terhadap pencemaran udara dan peningkatan layanan air bersih.

Kondisi Kondisi dan Kepadatan Bangunan Permukiman

Menurut Doxiadēs (1968), salah satu dari lima elemen utama penyusun permukiman adalah shells atau elemen perlindungan, yang dapat diartikan sebagai kondisi fisik bangunan tempat tinggal. Dalam konsep *Livability*, kualitas bangunan merupakan aspek penting karena berkontribusi langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.

Tabel 4. Hasil Pembobotan Variabel Kondisi dan Kepadatan Bangunan Permukiman

Sub Variabel	Indikator	Skor Indikator	Bobot	Total Skor Sub Variabel
Kondisi Bangunan	Kondisi fisik bangunan	100	0,5	50
Kepadatan Bangunan	Jumlah seluruh bangunan dibagi luas wilayah	100	0,5	50

Sumber: Peneliti, 2024

Kondisi dan kepadatan bangunan permukiman di sekitar TPA Putri Cempo menunjukkan hasil yang relatif baik. Berdasarkan observasi, seluruh bangunan tempat tinggal di kawasan ini memiliki kondisi fisik permanen, dengan bangunan semi permanen hanya ditemukan pada shelter pemilah sampah di halaman depan rumah. Hal ini menunjukkan bahwa hunian di sekitar TPA sudah memenuhi standar fisik yang layak, berbeda dengan temuan Ni'mah & Kurniawan (2016) di TPA Piyungan, Bantul, yang masih ditemukan bangunan semi permanen. Pada aspek kepadatan bangunan, terdapat 2.293 bangunan di area seluas 233 hektar, setara dengan 10 bangunan per hektar, yang menurut Kementerian PUPR (1987) termasuk dalam kategori kepadatan rendah. Kepadatan yang terjaga ini mendukung kenyamanan dan keamanan lingkungan, sesuai dengan pendapat Widayarthara (2017) bahwa kepadatan yang tinggi dapat mengganggu kenyamanan. Secara keseluruhan, meskipun berada di sekitar TPA, permukiman di kawasan ini masih menunjukkan kualitas lingkungan yang baik dan mendukung kualitas hidup masyarakat, sesuai dengan prinsip *Livability* menurut Doxiadēs (1968) dan Lynch (1984).



Ketersediaan Infrastruktur Dasar

Ketersediaan infrastruktur dasar di permukiman sekitar TPA Putri Cempo mencakup sarana pendidikan, kesehatan, ibadah, perdagangan, RTH, dan jaringan utilitas.

Tabel 5. Hasil Pembobotan Variabel Kondisi dan Kepadatan Bangunan Permukiman

Sub Variabel	Indikator	Skor Indikator	Bobot	Total Skor Sub Variabel
Sarana pendidikan	Ketersediaan sarana pendidikan seperti TK dan SD	100	0,09	9
Sarana kesehatan	Ketersediaan sarana kesehatan seperti posyandu	100	0,09	9
Sarana peribadatan	Ketersediaan sarana peribadatan seperti musholla dan masjid	100	0,09	9
Sarana perdagangan	Ketersediaan sarana perdagangan seperti toko	100	0,09	9
Sarana ruang terbuka	Ketersediaan ruang terbuka seperti taman dan lapangan olahraga	12	0,09	1
Jaringan listrik	Kapasitas jaringan listrik yang mencukupi kebutuhan	85	0,09	7,65
Sumber Air Bersih	Sumber air bersih pada tiap rumah	82	0,09	7,38
Sistem Jaringan Air Limbah	Ketersediaan jaringan MCK pada masing-masing rumah	100	0,09	9
Jaringan jalan	Persentase kerusakan jaringan jalan	94	0,09	8,5
Sistem Jaringan persampahan	Ketersediaan jaringan persampahan	82	0,09	7,38
Sistem Jaringan Drainase	Kemampuan drainase lingkungan mengalirkan limpasan air hujan	90	0,09	8,1

Sumber: Peneliti, 2024

Sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan perdagangan sudah memadai dan dapat dijangkau masyarakat sesuai standar SNI. Namun, RTH terbatas di empat lokasi, yang belum memenuhi kebutuhan seluruh kawasan. Jaringan listrik cukup memadai, dengan 85% rumah tangga memiliki kapasitas yang sesuai dan kualitas jaringan yang baik. Sumber air bersih sebagian besar berasal dari PAMSIMAS, meskipun sebagian kecil mengandalkan air



PDAM yang kualitasnya kurang baik. Sistem drainase dan air limbah cukup mendukung, meskipun terdapat penyumbatan di RW 39. Tantangan muncul pada infrastruktur jalan dan persampahan; beberapa jalan rusak atau belum terperkeras, dan perkerasan jalan bervariasi antara aspal dan cor beton. Sebagian besar rumah memiliki sistem air limbah dan MCK yang memadai, serta 82% masyarakat terlayani pengelolaan sampah, kecuali di RW 39, yang tidak mendapat layanan pengangkutan sampah karena kedekatannya dengan TPA. Secara keseluruhan, sebagian besar infrastruktur mendukung konsep *Livability*, meskipun terdapat kekurangan pada RTH hijau dan kondisi jalan yang perlu perbaikan.

Keamanan Penduduk Permukiman

Keamanan penduduk permukiman di sekitar TPA Putri Cempo dianalisis melalui dua sub-variabel: tingkat keamanan dan kegiatan pengamanan lingkungan.

Tabel 6. Hasil Pembobotan Variabel Tingkat Keamanan

Sub Variabel	Indikator	Skor Indikator	Bobot	Total Skor Sub Variabel
Tingkat Keamanan	Frekuensi terjadinya Tindakan kriminal	95	0,5	47,5
Kegiatan Pengamanan Lingkungan	Keberadaan kegiatan sistem keamanan lingkungan	100	0,5	50

Sumber: Peneliti, 2024

Berdasarkan kuesioner, 95% masyarakat melaporkan tidak pernah mengalami tindak kriminal, sementara 5% lainnya pernah menyaksikan tindak kejahatan, seperti pencurian barang berharga. Semua wilayah permukiman aktif melaksanakan kegiatan siskamling setiap malam, didukung dengan pos ronda di setiap RT. Keamanan, sebagai faktor penting dalam kenyamanan tinggal, diperkuat oleh upaya pengamanan lingkungan yang optimal, melalui kegiatan siskamling rutin dan keberadaan pos ronda. Meskipun ada potensi kerawanan, sistem pengamanan partisipatif ini berhasil meningkatkan rasa aman masyarakat setempat.

Partisipasi Masyarakat

Menurut M. Harry Mulya Zein & Sisca Septiani (2021), partisipasi merupakan keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam program pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

**Tabel 7. Hasil Pembobotan Variabel Keterlibatan Aktif Masyarakat**

Sub Variabel	Indikator	Skor Indikator	Bobot	Total Skor Sub Variabel
Keterlibatan Aktif Masyarakat	Frekuensi terjadinya tindak kriminal	36	1	36

Sumber: Peneliti, 2024

Dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat dianalisis melalui sub-variabel keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan kawasan permukiman sekitar TPA Putri Cempo. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 73% masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan, terutama melalui forum lingkungan seperti PKK, Karang Taruna, dan serasehan bapak-bapak, sementara 27% belum terlibat. Di kawasan permukiman formal yang dikembangkan oleh developer, tidak ada forum pengambilan keputusan, sehingga kebijakan terkait kawasan ditentukan oleh pengembang. Skor pembobotan partisipasi masyarakat adalah 73, yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di lokasi penelitian telah aktif terlibat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan tempat tinggalnya.

Kesesuaian kualitas permukiman disekitar TPA Putri Cempo berdasarkan komponen *Livability*

Berdasarkan hasil skoring indikator tiap sub-variabel selanjutnya diakumulasikan sesuai dengan masing-masing bobot indikatornya. Kemudian dilakukan perhitungan rata-rata untuk mendapatkan skor variabel dan sekaligus melakukan penilaian kesesuaian konsep *Livability* pada permukiman disekitar TPA Putri Cempo. Perhitungan tersebut secara detail sebagai berikut.

Tabel 8. Hasil Analisis Kesesuaian Konsep *Livability* pada Permukiman Disekitar TPA Putri Cempo

Variabel	Sub Variabel	Total Skor Sub Variabel	Skor Variabel
Kondisi perekonomian masyarakat	Jumlah pendapatan masyarakat	19	55
	Jenis pekerjaan masyarakat	36	
Kondisi kesehatan masyarakat	Tingkat kesehatan masyarakat	95	95
Kualitas lingkungan	Kualitas udara	0	41
	Kualitas air bersih	41	
Kondisi dan kepadatan bangunan yang ideal	Kondisi Bangunan	50	100
	Kepadatan Bangunan	50	
Ketersediaan Infrastruktur Dasar	Sarana pendidikan	9	85,5
	Sarana kesehatan	9	
	Sarana peribadatan	9	
	Sarana perdagangan	9	



Variabel	Sub Variabel	Total Skor Sub Variabel	Skor Variabel
	Sarana ruang terbuka	1	
	Jaringan listrik	7,65	
	Sumber air bersih	7,38	
	Jaringan air limbah	9	
	Jaringan jalan	9	
	Jaringan persampahan	7,38	
	Jaringan drainase	8,1	
Keamanan penduduk permukiman	Tingkat keamanan	47,5	
	Kegiatan pengamanan lingkungan	50	97,5
Partisipasi masyarakat	Keterlibatan aktif masyarakat	36	36

Sumber: Peneliti, 2024

Berdasarkan hasil skor seluruh variabel tersebut, untuk menentukan nilai kesesuaian konsep *Livability* pada permukiman disekitar TPA Putri Cempo dilakukan perhitungan rata-rata skor sebagai berikut:

$$\text{Kesesuaian Konsep Livability} = \frac{\text{Jumlah seluruh skor variabel}}{\text{Jumlah variabel}} = \frac{510}{7} = 72,85$$

Tabel 9. Klasifikasi Kesesuaian Konsep Livability

Skor	Kategori Kesesuaian
0 – 25	Sangat Tidak Sesuai
26 – 50	Tidak Sesuai
51 – 75	Cukup Sesuai
76 – 100	Sesuai

Sumber: Peneliti, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan kesesuaian konsep *Livability* pada permukiman disekitar TPA Putri Cempo memiliki total nilai 72,85. Berdasarkan klasifikasi yang sudah ditentukan sebelumnya, rentang nilai 72,85 termasuk kedalam kategori cukup sesuai. Berikut merupakan tabel klasifikasi kesesuaian konsep *Livability*.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa permukiman di sekitar TPA Putri Cempo, Kota Surakarta, mendekati konsep *Livability*, dengan sebagian besar fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan perdagangan sudah sesuai standar. Namun, kekurangan masih terdapat pada ruang terbuka hijau, kualitas udara, dan partisipasi masyarakat. Selain aspek sosial dan lingkungan yang memengaruhi kenyamanan hunian, perlu diperhatikan bahwa keberadaan permukiman dalam radius kurang dari 1 km dari TPA melanggar ketentuan Permen PUPR No.3 Tahun 2013, yang menetapkan jarak aman minimal 1 km



antara TPA dan kawasan permukiman untuk mengurangi risiko kesehatan dan pencemaran. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas lingkungan serta memastikan penataan kawasan yang lebih tertib, legal, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Bah, E. M., Faye, I., & Geh, Z. F. (2018). *Housing Market Dynamics in Africa*. Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1057/978-1-37-59792-2>
- BPS Kota Surakarta. (2023). *Kota Surakarta Dalam Angka 2023*.
- Doxiadēs, K. A. (1968). *Ekistics: an introduction to the science of human settlements*. Hutchinson.
- Dwinanda, I. G., Thareq, S. I., Kurniati, E., & Adelia, K. A. C. (2025). Interpretasi Sebaran Air Lindi Dengan Metode Potensial Diri dan Dampak Sosial Lingkungan di Kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Palangka Raya. *Jurnal Pendidikan Fisika*, 13(1), 46. <https://doi.org/10.24127/jpf.v13i1.12020>
- Huzaemah, S. (2020). Sampah Adalah Berkah; Studi Pola Kehidupan Sosial Ekonomi Pemulung Di Sekitaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 2(1), 81–92. <https://doi.org/10.18326/imej.v2i1.81-92>
- IAP. (2018). *Indonesia most livable City Index 2017*.
- Iskani, I. (2015). Pengukuran Skala Guttman Secara Tradisional (Cross Sectional). *Ejournal Poltekegal*.
- Jomehpour, M. (2015). Assessing the *Livability* of the New and Old Parts of Tehran, Municipality Districts 22 and 10 of Tehran. *OIDA International Journal of Sustainable Development*, 8(9), 87–96.
- Jonatan, O. R., & Zain, I. M. (2019). Analisis Penentuan Lokasi Temoat Oembuangan Akhir (TPA) Alternatif Kecamatan wates Kabupaten Kediri. *Swara Bhumi*, V(8), 318–323.
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS/1987 Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya Dengan Metode Analisa Komponen, Pub. L. No. 378/KPTS/1987, Yayasan Badan Penerbit PU (1987).
- Khadijah, S. S. (2019). *Analisis Tingkat Kesejahteraan Pemulung di TPA Terjun Kecamatan Medan Marelan [Skripsi]*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Lynch, K. (1984). *Good City Form*. The MIT Press.
- M. Harry Mulya Zein, & Sisca Septiani. (2021). Manajemen Partisipatif: Sebuah Pendekatan Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE*, 2(1), 01–15. <https://doi.org/10.55606/jass.v2i1.1023>
- Mubarrok, M. Z., Pertiwi, D. S., & Carnadi, C. (2025). Backlog Perumahan di Kota Yogyakarta sebagai Ancaman Ketahanan Nasional. *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 10(1), 259–278.
- Ni'mah, U., & Kurniawan, A. (2016). Kelayakan Lingkungan Permukiman di Sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, Kabupaten Bantul. *Jurnal Bumi Indonesia*, 5(4).



- Octavionesti, A. A., & Mardiansjah, F. H. (2017). Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Pembangunan Rusunawa: Studi Kasus Rusunawa Kaligawe, Kota Semarang. *Riptek*, 11(1), 41–56.
- Pemerintah Kota Surakarta. (2011). *RTRW Kota Surakarta Tahun 2011–2031*.
- Prihatin, R. B. (2016). Alih Fungsi Lahan di Perkotaan (Studi Kasus di Kota Bandung Dan Yogyakarta). *Jurnal Aspirasi*, 6(2), 105–118. <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v6i2.507>
- Rahayona, D., Sunarsih, E., Egit, K. F., Azzarah, N. D., Rahmah, S. A., & Kartika, T. P. (2024). Analisis Kualitas Lingkungan dan Dampaknya Terhadap Masyarakat di Sekitar TPA Sukawinatan Palembang. *HIGIENE: Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 9(2), 64–69. <https://doi.org/10.24252/higiene.v9i2.36459>
- Ramadanti, N. D., Astuti, W., & Putri, R. A. (2021). Dampak TPA Putri Cempo Terhadap Permukiman. *Desa-Kota*, 3(2), 103. <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v3i2.48352.103-121>
- Safira, N., Fernando, V. B., Dewi, R. K., Hasibuan, F., & Yamani, M. (2024). Pembangunan Rumah Susun Sebagai Solusi Strategis Untuk Mengatasi Keterbatasan Lahan Di Kota Bengkulu. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 607–614.
- Septi, S., Virgo, F., & Sailah, S. (2021). Analisis Kualitas Air Tanah Wilayah Sekitar TPA Sukawinatan Palembang. *JPF (Jurnal Pendidikan Fisika) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 10(1), 1–8. <https://doi.org/10.24252/jpf.v10i1.25335>
- Sinanto, R. A., Axmalia, A., Hariyono, W., & Mulasari, S. A. (2022). Gangguan Kesehatan Masyarakat Yang Bermukim di Sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Piyungan. *VISIKES: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 21(2). <https://doi.org/10.33633/vsikes.v21i2Supp.5322>
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian* (Cet. 1). Literasi Media Publishing.
- Slamet, M. siregar, & Nasution, R. D. (2020). Dampak Sosial Ekonomi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bagi Pemulung Desa Mrican Ponorogo. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 4(1), 67–74. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v4i1.7878.2020>
- Sukanto, A. B., Hasyim, A. W., & Purnamasari, W. D. (2021). Identifikasi Tingkat *Livability* Permukiman di Kampung Jodipan Dan Kampung Tridi Kota Malang. *Planning for Urban Region and Environment (PURE Journal)*, 10(3), 23–30.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (2011).
- Weber, E. H., Kissoon, P., & Koto, C. (2019). Moving to dangerous places. In *Dealing with climate change on small islands: Towards effective and sustainable adaptation* (pp. 267–293). Göttingen University Press. <https://doi.org/10.17875/gup2019-1220>
- Widyarthara, A. (2017). Konsep Kenyamanan Perumahan Sub Urban. *PAWON: Jurnal Arsitektur*, 1(2), 55–63.